

CASCADING SEKRETARIAT DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2024

WALIKOTA	Visi	Pasuruan Kota Madinah Maju Ekonominya , Indah Kotanya, Harmonis Warganya			
	Misi	MISI 1 : Mempercepat Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonominya Berbasis Potensi Lokal untuk Membuka Lapangan Kerja dan Pengurangan Kemiskinan MISI 4 : Transformasi Layanan Publik yang Mudah dan Cepat melalui digitalisasi Manajemen dan Birokrasi yang Adaptif			
	Tujuan	Meningkatnya Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi yang Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Lokal		Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis Berbasis Teknoplogi Informasi	
	Indikator Tujuan	Gini Rasio Pertumbuhan Ekonomi		Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	
	Sasaran	Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Ekonomi		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Penunjang Pendapatan Asli Daerah	
	Indikator Sasaran	1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TBT) 2. Angka Kemiskinan		1. PDRB Perkapita 2. Rasio PAD terhadap Pendapatan	
				Membangun Kapasitas Manajemen Pemerintah yang Adaptif dan Profesional 1. Nilai SAKIP 2. Opini BPK terhadap LKPD 3. Level Maturitas SPIP 4. Indeks Profesionalisme Aparatur	
				Integrasi Digitalisasi pada Pelayanan Publik 1. Indeks SPBE 2. Nilai IKM	
SETDA	Urusan	Penunjang Pemerintahan			
	Sasaran RPJMD	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Penunjang Pendapatan Asli Daerah		Membangun Kapasitas Manajemen Pemerintah yang Adaptif dan Profesional	
	Indikator Sasaran RPJMD	PDRB Perkapita		Nilai SAKIP	
	Tujuan PD	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Administrasi yang Mendukung Efektivitas dan Efisiensi Kebijakan Pemerintah Daerah			
	Indikator Tujuan	Indeks RB			
	Sasaran PD	Meningkatnya Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Dalam Menjamin Pelayanan Prima		Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan	
	Indikator Sasaran	Nilai Sakip PD Presentase Temuan yang Ditindaklanjuti		Prosentase Rumusan Kebijakan yang ditindak lanjuti SKM Pelayanan Sekretariat Daerah	
	Penanggungjawab	Bagian Umum Bagian Organisasi		Bagian Adm. Perekonomian Bagian Adm. Pembangunan Bagian Kesra Bagian Adm. Pemerintahan Bagian Adm. Perekonomian Bagian Protokol Bagian Hukum Bagian Adm. Pembangunan Bagian BLP Bagian Kesra Bagian Adm. Pemerintahan	
	Program PD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota		Program	

Indikator Program

Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terasilitasi (Bagian Umum)	Persentase Capaian Area Reformasi Birokrasi (Bagian Organisasi)	Persentase Layanan Kebutuhan Pimpinan yang Terasilitasi (Bagian Protokol)	1. Persentase Fasilitasi Kerjasama yang ditindaklanjuti PD 2. Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan yang Ditindaklanjuti PD (Bagian Adm. Pemerintahan)
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan : Penataan Organisasi	Kegiatan : Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kegiatan : Administrasi Tata Pemerintahan
Indikator Kegiatan : Presentase Dokumen Perencanaan yang tersusun tepat waktu	Indikator Kegiatan : Persentase perangkat daerah yang tepat fungsi dan ukuran	Indikator Kegiatan : Persentase PD yang Terlayani di Bidang Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	Indikator Kegiatan : Persentase rata - rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD
Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan : Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Sub Kegiatan : Fasilitasi Keprotokolan	Sub Kegiatan : Penataan Administrasi Pemerintahan
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Sub Kegiatan : Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Sub Kegiatan : Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan : Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Sub Kegiatan : Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

Indikator Sub Kegiatan :
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan :
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan :
Persentase Laporan yang tersusun tepat waktu

Sub Kegiatan :
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Sub Kegiatan :
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

Sub Kegiatan :
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Indikator Sub Kegiatan :
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Sub Kegiatan :
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Indikator Sub Kegiatan :
Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Kegiatan :
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan :
Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun tepat waktu

Indikator Sub Kegiatan :
Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Indikator Sub Kegiatan :
Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan

Indikator Sub Kegiatan :
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

Kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama Daerah

Indikator Kegiatan :
Persentase rata - rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD

Sub Kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri

Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri

Sub Kegiatan :
 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Indikator Sub Kegiatan :
 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

CASCADING SEKRETARIAT DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2025

WALIKOTA	Visi	Pasuruan Kota Madinah Maju Ekonominya , Indah Kotanya, Harmonis Warganya			
	Misi	MISI 1 : Mempercepat Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonominya Berbasis Potensi Lokal untuk Membuka Lapangan Kerja dan Pengurangan Kemiskinan MISI 4 : Transformasi Layanan Publik yang Mudah dan Cepat melalui digitalisasi Manajemen dan Birokrasi yang Adaptif			
	Tujuan	Meningkatnya Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi yang Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Lokal		Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis Berbasis Teknoplgi Informasi	
	Indikator Tujuan	Gini Rasio	Pertumbuhan Ekonomi	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	
	Sasaran	Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Ekonomi	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Penunjang Pendapatan Asli Daerah	Membangun Kapasitas Manajemen Pemerintah yang Adaptif dan Profesional	Integrasi Digitalisasi pada Pelayanan Publik
	Indikator Sasaran	1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TBT) 2. Angka Kemiskinan	1. PDRB Perkapita 2. Rasio PAD terhadap Pendapatan	1. Nilai SAKIP 2. Opini BPK terhadap LKPD 3. Level Maturitas SPIP 4. Indeks Profesionalisme Aparatur	1. Indeks SPBE 2. Nilai IKM
SETDA	Urusan	Penunjang Pemerintahan			
	Sasaran RPJMD	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Penunjang Pendapatan Asli Daerah		Membangun Kapasitas Manajemen Pemerintah yang Adaptif dan Profesional	
	Indikator Sasaran RPJMD	PDRB Perkapita		Nilai SAKIP	
	Tujuan PD	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Administrasi yang Mendukung Efektivitas dan Efisiensi Kebijakan Pemerintah Daerah			
	Indikator Tujuan	Indeks RB			
	Sasaran PD	Meningkatnya Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Dalam Menjamin Pelayanan Prima		Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan	
	Indikator Sasaran	Nilai Sakip PD	Presentase Temuan yang Ditindaklanjuti	Prosentase Rumusan Kebijakan yang ditindak lanjuti	SKM Pelayanan Sekretariat Daerah
	Penanggungjawab	Bagian Umum Bagian Organisasi	Bagian Umum	Bagian Adm. Perekonomian Bagian Adm. Pembangunan Bagian Kesra Bagian Adm. Pemerintahan	Bagian Adm. Perekonomian Bagian Protokol Bagian Hukum Bagian Adm. Pembangunan Bagian BLP Bagian Kesra

Program PD
Indikator Program

Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota		
Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terasilitasi (Bagian Umum)	Persentase Capaian Area Reformasi Birokrasi (Bagian Organisasi)	Persentase Layanan Kebutuhan Pimpinan yang Terasilitasi (Bagian Protokol)
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan : Penataan Organisasi	Kegiatan : Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Indikator Kegiatan : Presentase Dokumen Perencanaan yang tersusun tepat waktu	Indikator Kegiatan : Persentase perangkat daerah yang tepat fungsi dan ukuran	Indikator Kegiatan : Persentase PD yang Terlayani di Bidang Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan
Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan : Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Sub Kegiatan : Fasilitasi Keprotokolan
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Sub Kegiatan : Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan : Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Sub Kegiatan : Pendokumentasian Tugas Pimpinan
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		

Program
1. Persentase Fasilitasi Kerjasama yang ditindaklanjuti PD 2. Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan yang Ditindaklanjuti PD (Bagian Adm. Pemerintahan)
Kegiatan : Administrasi Tata Pemerintahan
Indikator Kegiatan : Persentase rata - rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD
Sub Kegiatan : Penataan Administrasi Pemerintahan
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan
Sub Kegiatan : Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
Kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama Daerah

Indikator Kegiatan : Persentase Laporan yang tersusun tepat waktu
Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Sub Kegiatan : Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Indikator Kegiatan : Persentase rata - rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD
Sub Kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri

CASCADING SEKRETARIAT DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2025

WALIKOTA Visi	Pasuruan Kota Madinah Maju Ekonominya , Indah Kotanya, Harmonis Warganya			
Misi	MISI 1 : Mempercepat Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonominya Berbasis Potensi Lokal untuk Membuka Lapangan Kerja dan Pengurangan Kemiskinan MISI 4 : Transformasi Layanan Publik yang Mudah dan Cepat melalui digitalisasi Manajemen dan Birokrasi yang Adaptif			
Tujuan	Meningkatnya Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi yang Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Lokal		Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis Berbasis Teknoplologi Informasi	
Indikator Tujuan	Gini Rasio	Pertumbuhan Ekonomi	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	
Sasaran	Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Ekonomi	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Penunjang Pendapatan Asli Daerah	Membangun Kapasitas Manajemen Pemerintah yang Adaptif dan Profesional	Integrasi Digitalisasi pada Pelayanan Publik
Indikator Sasaran	1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TBT) 2. Angka Kemiskinan	1. PDRB Perkapita 2. Rasio PAD terhadap Pendapatan	1. Nilai SAKIP 2. Opini BPK terhadap LKPD 3. Level Maturitas SPIP 4. Indeks Profesionalisme Aparatur	1. Indeks SPBE 2. Nilai IKM
SETDA Urusan	Penunjang Pemerintahan			
Sasaran RPJMD	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Penunjang Pendapatan Asli Daerah		Membangun Kapasitas Manajemen Pemerintah yang Adaptif dan Profesional	
Indikator Sasaran RPJMD	PDRB Perkapita		Nilai SAKIP	

Tujuan PD Indikator Tujuan	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Administrasi yang Mendukung Efektivitas dan Efisiensi Kebijakan Pemerintah Daerah	
	Indeks RB	

Sasaran PD Indikator Sasaran	Meningkatnya Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Dalam Menjamin Pelayanan Prima		Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan	
	Nilai Sakip PD	Presentase Temuan yang Ditindaklanjuti	Prosentase Rumusan Kebijakan yang ditindak lanjuti	SKM Pelayanan Sekretariat Daerah



Integrasi Digitalisasi pada
Pelayanan Publik

Nilai IKM

am Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program Perekonomian dan Pembangunan

SKM Pelayanan Hukum (Bagian Hukum)	Persentase Kebijakan Bidang Kesra yang Ditindaklanjuti PD (Bagian Kesra)	Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan SDA yang Ditindaklanjuti PD (Bagian Adm. Perekonomian & SDA)	Persentase Kebijakan Bidang Pembangunan yang Ditindaklanjuti PD (Bagian Adm. Pembangunan)	1. Persentase PD Tertib Adm. Pengadaan Barang dan Jasa 2. IKM Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (Bagian BLP)
Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kegiatan : Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Indikator Kegiatan : Persentase Ketercapaian Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan : Persentase kebijakan bidang kesra	Indikator Kegiatan : Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti PD	Indikator Kegiatan : Prosentase dokumen administrasi pembangunan yang disusun	Indikator Kegiatan : Persentase PD Tertib pengadaan barang dan jasa -
Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Sub Kegiatan : Fasilitasi Bantuan Hukum	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Sub Kegiatan : Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Sub Kegiatan : Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Sub Kegiatan : Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Sub Kegiatan : Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Sub Kegiatan : Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Sub Kegiatan : Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Indikator Sub Kegiatan :
Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi

Indikator Sub Kegiatan :
Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas

Indikator Sub Kegiatan :
Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil

Indikator Sub Kegiatan :
Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

Indikator Sub Kegiatan :
Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Sub Kegiatan :
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD

Indikator Sub Kegiatan :
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD

Sub Kegiatan :
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD

Indikator Sub Kegiatan :
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD

Kegiatan : Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

Indikator Kegiatan :
Persentase Kebijakan Bidang SDA yang ditindaklanjuti PD

Sub Kegiatan :
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan

Indikator Sub Kegiatan :
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja

Sub Kegiatan :
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup

Indikator Sub Kegiatan :
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian

Sub Kegiatan :

Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan



Integrasi Digitalisasi pada Pelayanan Publik

Nilai IKM

am Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
SKM Pelayanan Hukum (Bagian Hukum)	Persentase Kebijakan Bidang Kesra yang Ditindaklanjuti PD (Bagian Kesra)
Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
Indikator Kegiatan : Persentase Ketercapaian Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan : Persentase kebijakan bidang kesra
Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
Sub Kegiatan : Fasilitasi Bantuan Hukum	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB
Sub Kegiatan : Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas

Program Perekonomian dan Pembangunan		
Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan SDA yang Ditindaklanjuti PD (Bagian Adm. Perekonomian & SDA)	Persentase Kebijakan Bidang Pembangunan yang Ditindaklanjuti PD (Bagian Adm. Pembangunan)	1. Persentase PD Tertib Adm. Pengadaan Barang dan Jasa 2. IKM Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (Bagian BLP)
Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kegiatan : Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Indikator Kegiatan : Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti PD	Indikator Kegiatan : Prosentase dokumen administrasi pembangunan yang disusun	Indikator Kegiatan : Persentase PD Tertib pengadaan barang dan jasa -
Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Sub Kegiatan : Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Sub Kegiatan : Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Sub Kegiatan : Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Sub Kegiatan : Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Sub Kegiatan : Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD		

<p>Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD</p>
<p>Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD</p>
<p>Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD</p>
<p>Kegiatan : Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</p>
<p>Indikator Kegiatan : Persentase Kebijakan Bidang SDA yang ditindaklanjuti PD</p>
<p>Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan</p>



